

Humanitaria: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 2962-2948
E-ISSN : 2962-293X

DOI <https://doi.org/10.14421/hum.v3i2.3657>

Vol. 3 No.02

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/humanitaria>

PERAN SEKOLAH GAJAHWONG TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK KELOMPOK MASYARAKAT MARGINAL

Tri Isnaeni Ades Ria, Ashfi Mazida Mauila, Aura Azahra, Muhammad Ardiansyah

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: aderia33@gmail.com,

Abstract

This study aims to analyze the role of Gajahwong School as a manifestation of humanist education in fulfilling the right to education of children from marginalized communities. This research uses a qualitative approach with a case study type. Data collection techniques were conducted through interviews with four informants who are facilitators and student guardians, participant observation of learning activities and social interactions at school, as well as documentation in the form of school archives and visual documentation of educational activities. The results show that Gajahwong School has a significant role in fulfilling the right to education through three main dimensions: first, providing affordable and flexible access to education for children of marginalized groups; second, developing a curriculum that is contextual and relevant to the socio-economic conditions of students; and third, creating a learning environment that is inclusive and free from discrimination. This research concludes that the existence of Gajahwong School contributes to presenting the concept of humanist education for the oppressed such as marginalized communities, as well as becoming an alternative model for the implementation of the right to education.

Keyword: Pedagogy of the Oppressed, Marginalized Communities, Gajahwong School

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sekolah Gajahwong sebagai perwujudan pendidikan humanis dalam pemenuhan hak pendidikan anak kelompok masyarakat marginal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap empat informan yang merupakan fasilitator dan wali murid siswa, observasi partisipan terhadap kegiatan pembelajaran dan interaksi sosial di sekolah, serta dokumentasi berupa arsip sekolah dan dokumentasi visual kegiatan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Gajahwong memiliki peran signifikan dalam pemenuhan

hak pendidikan melalui tiga dimensi utama: pertama, menyediakan akses pendidikan yang terjangkau dan fleksibel bagi anak-anak kelompok marginal; kedua, mengembangkan kurikulum yang kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial-ekonomi siswa; dan ketiga, menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan bebas dari diskriminasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Sekolah Gajahwong berkontribusi dalam menghadirkan konsep pendidikan humanis bagi kaum tertindas seperti masyarakat marginal.

Kata Kunci: Pendidikan Humanis, Masyarakat Marginal, Sekolah Gajahwong.

PENDAHULUAN

Kelompok masyarakat marginal, dalam konteks sosial merupakan kelompok masyarakat pra-sejahtera dengan kondisi yang terpinggirkan dari kehidupan sosial. Kelompok marginal identik dengan kondisi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap berbagai bidang, seperti sosial-ekonomi, hukum dan politik, serta tinggal di lokasi dengan akses yang tidak memadai terutama akses terhadap kesehatan dan pendidikan, (Rahman, 2019). Kelompok masyarakat marginal menjadi kelompok yang tersisih atau disisihkan dari pembangunan sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menikmati manfaat pembangunan, (Khalis Asyifani et al., 2014). Kelompok masyarakat marginal hidup di bawah garis kemiskinan dan seringkali mengalami diskriminasi.

Kelompok masyarakat yang mengalami marginalisasi juga menyebabkan anak-anak dalam masyarakat tersebut mengalami marginalisasi yang sama. Kondisi anak-anak kelompok masyarakat marginal terdiri dari tiga aspek, yaitu kondisi geografis, kondisi ekonomis, dan kondisi sosial, (Sandora, 2020). Kondisi geografis mencakup lokasi geografis

tempat tinggal suatu kelompok masyarakat, anak-anak kelompok masyarakat marginal umumnya tinggal di lingkungan kumuh, wilayah tidak layak huni, dipinggiran sungai atau bahkan di pinggir rel kereta. Kondisi ekonomis mencakup kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pemenuhan gizi yang cukup untuk membantu tumbuh kembang anak. Kondisi sosial mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman bagi anak.

Salah satu hal fundamental yang diperlukan bagi anak-anak kelompok masyarakat marginal adalah pemenuhan hak pendidikan anak, (Hamdan, 2013). Pendidikan merupakan hak bagi seluruh anak di Indonesia, namun masih banyak kesulitan yang dihadapi anak-anak kelompok masyarakat marginal dalam mendapatkan akses pendidikan dengan berbagai hambatan yang kompleks. Menurut data UNICEF, (Nas, 2005), dalam laporan berjudul “Situasi Anak-Anak dan Kaum Muda di Kota-Kota di Indonesia” menunjukkan bahwa sebanyak 5,6 juta anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan di Indonesia tinggal di permukiman kumuh, dan sekitar 37% dari tinggal di bawah garis kemiskinan, hal ini dipengaruhi utamanya oleh kesenjangan sosial-ekonomi yang menghambat akses terhadap pendidikan. Sedangkan di DIY masih ada 31,5% populasi anak-anak di rumah tangga kumuh perkotaan yang mengalami kesulitan akses pendidikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan rumah tangga kumuh sebagai sekelompok orang yang tinggal di dalam bangunan yang sama yang tidak memiliki akses

terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak dan dengan luas tinggal yang tidak mencukupi yang ditentukan oleh ukuran luas lantai dan bahan bangunan, (RAMDHON, 2021). Laporan dari analisis 10 indikator kesejahteraan anak di 77 negara menunjukkan bahwa di sebagian besar negara, anak-anak yang tinggal di perkotaan mempunyai kondisi dan akses layanan penting yang lebih baik daripada anak di pedesaan. Namun hasil ini menyembunyikan kesenjangan dari perkotaan itu sendiri dimana anak-anak perkotaan termiskin di 1 dari 6 negara bahkan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menempuh pendidikan atau menyelesaikan sekolah dasarnya dibandingkan anak-anak yang tinggal di pedesaan, (WHO and UNICEF, 2018).

Perlindungan mengenai hak-hak anak telah diatur dalam Deklarasi Anak atau Deklarasi Jenewa pada tahun 1979, yang kemudian diadopsi dan disempurnakan pada tahun 1989 oleh PBB menjadi Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*). Konvensi tersebut disetujui dan ditandatangani oleh 192 negara. Konvensi ini menghasilkan komitmen prioritas utama pada hak-hak anak dan kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangannya. Atas dasar ini, negara-negara PBB harus merumuskan kebijakan dan undang-undang yang sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, dan mengambil tindakan praktis untuk menjamin perlindungan hak dan kepentingan anak, (Haling et al., 2018).

Perlindungan hak-hak anak di Indonesia diatur dalam pasal 52 ayat (2) UU HAM, yang berbunyi “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Salah satu hak anak yang harus dipenuhi adalah hak mendapat pendidikan, Pasal 1 Ayat 31 UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk anak-anak dengan keterbatasan atau dalam situasi kurang beruntung, memiliki hak yang sama untuk menerima pendidikan. Hak pendidikan anak juga diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Setiap anak memiliki hak yang sangat mendasar untuk mendapatkan pendidikan. Realisasi pendidikan dapat tercapai apabila semua pihak, termasuk orang tua, lembaga masyarakat, institusi pendidikan, dan pemerintah, bersedia bekerja sama untuk mendukung pemenuhan hak anak atas pendidikan.

Secara khusus artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Sekolah Gajahwong dalam pemenuhan hak pendidikan anak kelompok masyarakat marginal di Kampung Ledhok Timoho. Dengan demikian, dapat dilihat bagaimana strategi Sekolah Gajahwong berperan dalam memberikan pemenuhan hak pendidikan yang dibutuhkan oleh anak kelompok masyarakat marginal. Serta melihat bagaimana nilai-nilai dari Sekolah

Humanitaria: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 2962-2948
E-ISSN : 2962-293X

DOI <https://doi.org/10.14421/hum.v3i2.3657>

Vol. 3 No.02

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/humanitaria>

Gajahwong menghidupkan kesadaran yang kritis terhadap aspek lingkungan tempat tinggal kelompok masyarakat marginal, khususnya di Kampung Ledhok Timoho yang menjadi lokasi penelitian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan luas terkait peran Sekolah Gajahwong dalam pemenuhan hak pendidikan anak kelompok masyarakat marginal di Kampung Ledhok Timoho. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap empat informan. Proses wawancara dengan informan dilakukan secara terencana dengan penjadwalan yang telah disepakati sebelumnya. Wawancara dengan para informan dilakukan langsung di lokasi penelitian, yaitu di Sekolah Gajawong, Kampung Ledhok Timoho, untuk sekaligus melakukan observasi lapangan sehingga dapat menangkap kondisi sosial yang sesungguhnya di lokasi penelitian serta melihat aktifitas masyarakat secara utuh dan cermat.

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan berasal dari latar belakang yang berbeda untuk menghasilkan data yang lebih kompleks dari beragam sudut pandang. Terdapat dua kategori informan yang ditentukan dalam penelitian ini agar informasi yang didapatkan relevan dengan masalah

penelitian, yaitu 1) Fasilitator dan pengajar atau volunteer di Sekolah Gajahwong, 2) Wali murid siswa/siswi Sekolah Gajahwong yang tinggal di Kampung Ledhok Timoho. Keempat informan tersebut terdiri dari dua orang pengajar yang merupakan koordinator dan fasilitator Sekolah Gajahwong, yaitu Neneng Maryam dan Islamiyatur Rohmah, dua informan lainnya merupakan orang tua atau wali murid siswa Sekolah Gajahwong dari kelas akar dan kelas rumput, yaitu Yulianti dan Khusnul Khotimah. Wawancara dengan para informan dilakukan pada 18 Desember 2024 dan diawali dengan Forum Group Discussion (FGD) dengan para wali murid dan fasilitator, bersamaan dengan agenda *parents meeting* yang diakan pihak sekolah sebagai agenda wajib yang dilakukan setiap bulan untuk menyampaikan perkembangan dan progres belajar setiap murid.

KAJIAN TEORI

Pedagogy of the Oppressed - Paulo Freire

Paulo Freire, seorang pemikir pendidikan asal Brazil merumuskan suatu konsep pendidikan melalui bukunya, "*Pedagogy of the Oppressed*" yang menawarkan pengaplikasian pendidikan terhadap kelompok masyarakat marginal melalui prinsip pembebasan dan kesetaraan yang mengedepankan humanisme. Bagi Freire, (Freire, 2020), pendidikan haruslah disandarkan pada kesadaran manusia. Freire kemudian mengembangkan konsep pendidikannya berlandaskan pada tiga hal yakni pengajar, pendidik dan realitas, (Susanto,

2008). Hubungan ketiganya dilihat sebagai sebuah proses untuk memperoleh kesadaran (*consciousness*). Hubungan guru dan murid tidak lagi dilihat sebagai subjek dan objek seperti gaya bank yang membedakan hierarkis guru terhadap murid. Namun keduanya adalah subjek, guru sebagai mitra humanis dan demokratis bagi murid dalam rangka mempelajari dan memahami realitas sosial sebagai objek dan basis dalam membangun kesadaran kritis, (Cardoso¹ et al., 2024). Paulo Freire menyampaikan bahwa, (Freire, 2020), melalui daya kritis dan kesadaran yang dibangun bersama melalui pendidikan, masyarakat akhirnya mampu untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri, yakni pembebasan atau tiadak adanya lagi kelompok penindas (*oppressor*) dan kelompok tertindas (*opposed*).

Inti dari pendidikan kaum tertindas adalah tindakan praksis dalam menghidupkan kepekaan masyarakat akan ketertinggalan yang dialami. Kesadaran masyarakat dibangun atas kesadaran terhadap kondisi lingkungan sosial. Konsep pendidikan Freire didasarkan pada pengalaman masa kecilnya. Sejak dini, Freire banyak diajarkan nilai-nilai humanistik lewat keluarga dan bersentuhan langsung dengan masyarakat marginal di kota kelahirannya. Pengalaman tersebut menjadi lebih terasa ketika ia mengalami masa krisis ekonomi yang berimbas langsung pada masyarakat miskin. Melalui pengalaman-pengalaman hidupnya, Freire melihat bahwa masyarakat terbentuk sebagai yang tertindas (*opposed*) dan sebagai yang menindas (*oppressed*). Hubungan antara masyarakat yang

Humanitaria: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 2962-2948
E-ISSN : 2962-293X

DOI <https://doi.org/10.14421/hum.v3i2.3657>

Vol. 3 No.02

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/humanitaria>

menindas dengan tertindas selamanya hanya akan melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan lingkungan sosial. Bagi Freire, masyarakat membutuhkan pembebasan (librasi) agar terbebas dari sistem tersebut, sebagai upaya untuk menuju kesana pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar dan merdeka. Akan tetapi, Freire melihat sistem pendidikan telah dipengaruhi oleh sistem penindas sehingga memunculkan kebudayaan bisu melalui pendidikan bergaya bank yang melanggengkan kekuasaan kaum penindas, (Freire, 2020).

Profil Kampung Ledhok Timoho

Kampung Ledhok Timoho terletak di bantaran Sungai Gajahwong yang terbentuk pada tahun 1995. Pemukiman Kampung Ledhok Timoho dibangun diatas tanah yang memiliki permasalahan cukup kompleks terkait status kedudukan dan kepemilikannya. Tanah yang digunakan sebagai pemukiman secara kepemilikan merupakan tanah sultan (*Sultan Ground*), selain itu juga merupakan tanah irisan, yaitu tanah yang melintas lebih dari satu wilayah administratif yang berbeda, yang berada di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Tanah di kawasan pemukiman Kampung Ledhok Timoho juga merupakan tanah pengairan, yaitu tanah yang terletak di sekitar sungai. Menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 19 Tahun 2021, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus memperhatikan aspek konservasi lingkungan, sosial, dan budaya. Membangun rumah di tanah pengairan, perlu memastikan

bahwa tanah tersebut bukan milik negara atau tanah yang dilindungi dan mendapatkan izin dari kedinasan terkait.

Sulitnya mengatur urusan kepemilikan tanah di Yogyakarta bagi penduduk pendatang dari luar daerah Yogyakarta karena dua alasan utama, yaitu pertama alasan sejarah, kedua karena adanya kekhawatiran penguasaan tanah oleh WNI non-pribumi. Kedua alasan itu menjadi dasar keluarnya Surat Instruksi Wakil Gubernur tahun 1975 yang tidak memperbolehkan WNI non-pribumi memiliki hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat tinggal berupa gubuk yang didirikan di pemukiman Kampung Ledhok Timoho awalnya hanya berada di sepanjang tembok pembatas perumahan APMD, Timoho, yang kemudian semakin hari jumlahnya semakin bertambah. Mayoritas orang yang tinggal di kawasan tersebut adalah pendatang dari luar daerah Yogyakarta yang pada awal mulanya menjadi pemulung, pengamen dan jenis pekerjaan serabutan lainnya.

Semakin banyaknya gubuk yang dibangun sebagai tempat tinggal di kawasan tersebut, para pemukim akhirnya menemui kepala RT terdekat untuk meminta izin menempati kawasan tersebut sebagai wilayah pemukiman. Menurut Bapak Jumadi, tokoh masyarakat setempat, (Stephanus Novi Presetia, 2014), mengungkapkan bahwa, penduduk yang bermukim di atas tanah tersebut hanya bermodalkan mental *nekat*, dengan cara menyiasati mengelola kawasan tersebut sebagai pemukiman yang rapi.

Secara administrasi Kampung Ledhok Timoho merupakan pemukiman yang ilegal, namun keberadaannya telah diakui secara sosial. Kepala RT setempat, (Stephanus Novi Presetia, 2014), berprinsip bahwa, pihak RT tidak menyuruh kelompok tersebut untuk menempati tanah tersebut, namun juga tidak melarang menempatnya sebagai kawasan pemukiman. Adanya kendala dalam mengurus administrasi secara legal ini menyebabkan status masyarakat yang tinggal di Kampung Ledhok Timoho juga menjadi abu-abu. Meskipun keberadaannya diakui secara sosial, namun masyarakat Kampung Ledhok Timoho kesulitan melegalkan status keberadaannya secara administratif.

Kendala administrasi tersebut juga menyebabkan berbagai macam kesulitan pada masyarakat Kampung Ledhok Timoho seperti: 1). Tidak dapat mengurus KK dengan alamat Kampung Ledhok Timoho, 2). Tidak dapat mengakses Surat Keterangan Miskin ataupun bantuan sosial dari pemerintah, 3). Tidak mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan seperti jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) atau jaminan kesehatan daerah (jamkesda), 4). Keluarga dengan identitas yang tidak terdata di alamat setempat juga menyebabkan kendala administrasi bagi anak-anak yang akan melanjutkan sekolah baik itu tingkat SD, SMP ataupun SMA.

Menurut Alip Yog, (Stephanus Novi Presetia, 2014), selaku pemerhati sosial, menyampaikan bahwa, permasalahan yang dihadapi masyarakat Kampung Ledhok Timoho merupakan permasalahan yang rumit untuk dicarikan solusinya. Disatu sisi pemerintah

berprinsip pada kebenaran legal formal bahwa masyarakat Kampung Ledhok Timoho menempati tanah yang tidak bertuan, sehingga pemerintah tidak dapat memberikan pengakuan secara administrasi dan menjadikannya kawasan pemukiman yang legal untuk ditempati. Sedangkan disisi lain, masyarakat Kampung Ledhok Timoho, beranggapan bahwa selama masyarakat menempati tanah tersebut dengan tertib dan tidak menimbulkan masalah sosial, seharusnya mendapatkan hak pengakuan secara legal dari pemerintah.

Pendapat lain juga disampaikan Yogi Prasetyo, Aktivist HAM The Hasyim Asyari Institute, (Stephanus Novi Presetia, 2014), dalam konteks permasalahan yang dihadapi masyarakat Kampung Ledhok Timoho, reforma agraria harus ditegakkan karena hal tersebut merupakan suatu hak yang melekat pada masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa, ketika terdapat tanah-tanah yang ditelantarkan dan ada masyarakat yang memanfaatkannya lebih dari satu dekade, maka secara otomatis masyarakat itulah yang berhak menempati tanah tersebut dan mendapatkan hak penuh atas tanah tersebut.

Meskipun tidak diakui secara administrasi, selama 30 tahun lamanya, Kampung Ledhok Timoho masih berdiri sampai saat ini sebagai pemukiman yang ilegal. Hal tersebut menjadi bukti bahwa, keberadaan Kampung Ledhok Timoho dan masyarakat yang tinggal di dalamnya, memang diakui secara sosial. Alasan yang menyebabkan Kampung Ledhok Timoho masih tetap ada sampai saat ini karena, banyaknya kegiatan sosial, seperti pemberdayaan atau pembangunan masyarakat, salah satunya adalah mendirikan komunitas

Sekolah Gajahwong. Didirikannya sekolah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menguatkan pendidikan masyarakat Kampung Ledhok Timoho yang kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan yang kurang baik.

Profil Sekolah Gajahwong

Sekolah Gajahwong merupakan lembaga pendidikan yang dinaungi oleh TAABAH (Team Advokasi Arus Bawah). Sekolah ini berlokasi di Kampung Ledhok Timoho, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta. Sekolah Gajahwong memberikan pendidikan anak usia dini, pada anak-anak yang tinggal di Kampung Ledhok Timoho. Sekolah Gajahwong menerapkan model pengembangan pada setiap individu, serta memberikan intervensi agar mendorong semangat anak dalam belajar, memberikan motivasi pentingnya pendidikan, mendorong pentingnya peran lingkungan dan memberi stimulus pada anak usia dini. Sekolah Gajahwong juga berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang bersifat kontekstual dan inklusif, dimana yang menjadi fokus utamanya adalah anak-anak yang berasal dari kelompok masyarakat marginal, khususnya di Ledhok Timoho, Yogyakarta.

Sekolah Gajahwong memiliki visi “terwujudnya masyarakat yang mendukung tumbuh dan kembang anak yang optimal”. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut Sekolah Gajahwong memiliki misi sebagai agen perubahan yang membela hak anak

Humanitaria: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 2962-2948
E-ISSN : 2962-293X

DOI <https://doi.org/10.14421/hum.v3i2.3657>

Vol. 3 No.02

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/humanitaria>

kelompok masyarakat marginal, kelompok pendukung pemenuhan hak anak, kelompok pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan, motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu dengan kepentingan yang sama, unsur penting dalam gerakan masyarakat sipil untuk pemenuhan hak anak. Sekolah Gajahwong berprinsip untuk menciptakan ruang pembelajaran bersama, sebuah upaya pemberdayaan menyeluruh bagi edukator, murid, warga, serta lingkungan sekitar, di mana setiap individu adalah guru, lingkungan adalah sekolah, dan pengalaman adalah ilmu.

Sekolah Gajahwong sebagai sekolah kolektif memiliki kurikulumnya tersendiri yang disusun oleh inisiator yang juga merupakan anggota komunitas sekolah. Kurikulum ini didasarkan pada konteks masyarakat marginal serta prinsip hak-hak anak, dengan sifat yang dinamis dan progresif, terutama dalam memperhatikan kebutuhan dan karakteristik perkembangan anak. Dalam pelaksanaannya, Sekolah Gajahwong memiliki lima program kelas, yaitu kelas akar yang dikhususkan bagi anak berumur 3-5 tahun, kelas rumput yang dikhususkan bagi anak berumur 5-7 tahun, kelas batang dan ranting atau yang biasa disebut kelas sore pada hari Sabtu atau Minggu sore yaitu kelas yang diprioritaskan untuk alumni sekolah Gajahwong yang berumur 7-15 tahun, serta kelas pohon yang dikhususkan untuk orang tua dan wali murid.

Sekolah Gajahwong memberikan peluang program volunteer yang terbuka untuk umum, di mana peserta dapat menjadi fasilitator kelas, anggota divisi usaha dana, atau

konten kreator sesuai minat dan divisi yang dipilih. Pendaftaran sebagai fasilitator kelas dilakukan di awal semester, sementara rekrutmen divisi lain bergantung pada kebutuhan sekolah. Durasi minimal menjadi volunteer kelas adalah 6 bulan, yang dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.

PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Kelompok Masyarakat Marginal

Secara kategoris, masyarakat Kampung Ledhok Timoho termasuk kedalam kelompok masyarakat marginal dilihat dari aspek sosial-ekonomi, hukum dan politik, dalam bahasa Freire, dapat disebut sebagai masyarakat yang tertindas. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu aspek penting dalam rangka perbaikan kualitas hidup bagi masyarakat marginal. Kehadiran sekolah Gajah Wong yang diinisiasi oleh TAABAH (Team Advokasi Arus Bawah) sebagai lembaga pendidikan di Kampung Ledhok Timoho telah memberikan ruang dan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan usia dini. Peran Sekolah Gajahwong merupakan upaya mewujudkan dan memenuhi hak yang setara bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Sekolah Gajahwong adalah wujud dari pendidikan humanis bagi kaum tertindas. Pendidikan humanis berarti semua siswa berhak belajar atau memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dalam lingkungan yang menyenangkan, dengan penekanan khusus pada

siswa yang rentan terhadap pemisahan dan marginalisasi. Sekolah harus menerima semua anak, tidak peduli fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi lainnya (Zahroh, 2019). Tantangan dan hambatannya pun tidaklah mudah dan ringan dalam pendiriannya. Sekolah ini pada perkembangannya, mulai dari tahun 2009 awal berdirinya hingga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dan pada 2018 sudah dapat terlihat perkembangannya yang semakin tertata dan dibuka bukan hanya untuk anak-anak marginal saja namun memberikan penawaran sekolah yang lebih inklusif bagi siapa saja yang ingin bersekolah di Sekolah Gajahwong (*Wawancara*, 2024).

Kehadiran Sekolah Gajah Wong merupakan suatu inisiatif yang mengedepankan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak melalui pendidikan humanis bagi kaum tertindas. Pendekatan ini didasarkan pada asas bahwa akses pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sebagaimana yang diamanatkan dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi Hak Anak. Dengan memperkuat infrastruktur pendidikan dan menyediakan program-program yang terencana Sekolah Gajahwong berperan penting untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan relevansi pendidikan bagi anak-anak kelompok masyarakat marginal.

Melalui pendekatan ini, Sekolah Gajahwong berupaya memberikan pendidikan yang berkualitas dengan media pembelajaran yang dibuat berdasarkan indikator psikologis yang berkaitan dengan tahap perkembangan anak pada usia tersebut, yang tidak hanya mencakup

aspek kognitif, tetapi juga aspek emosional, sosial, dan moral anak-anak. Dengan demikian, Sekolah Gajahwong tidak hanya bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang merata, tetapi juga untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan, berkualitas, dan dapat membantu anak-anak mencapai potensi maksimal dalam menghadapi tantangan masa depan.

Peran Sekolah Gajahwong Pada Pendidikan Kaum Tertindas - Paulo Freire

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan fasilitator dan wali murid, observasi partisipan, dan analisis dokumentasi, Sekolah Gajahwong menunjukkan peran yang sangat signifikan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak kelompok masyarakat marginal. Peran tersebut termanifestasi dalam tiga dimensi utama yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan akses pendidikan yang bermakna bagi kelompok yang selama ini mengalami eksklusi sosial.

1. Menyediakan Akses Pendidikan Terjangkau dan Fleksibel

Dimensi pertama yang menjadi temuan kunci adalah kemampuan Sekolah Gajahwong dalam menyediakan akses pendidikan yang terjangkau dan fleksibel bagi anak-anak kelompok marginal. Hasil wawancara dengan fasilitator, (Wawancara, 2024a), menunjukkan bahwa sekolah ini menerapkan sistem pengelolaan pendanaan gotong royong. Para siswa yang bersekolah di Sekolah Gajahwong, mulai dari kelas akar (3-5 tahun) dan kelas rumput (5-7 tahun), tidak dibebankan dengan adanya pembelian

pakaian, sepatu, dan peralatan sekolah lainnya yang umumnya diseragamkan dengan seluruh siswa. Selain itu juga tidak adanya biaya bulanan sekolah yang dibebankan kepada para wali murid. Maka dari itu strategi yang dilakukan Sekolah Gajahwong untuk mendapatkan dukungan pendanaan agar tetap bisa menyelenggarakan proses pembelajaran yang maksimal kepada siswa adalah dengan berbagai cara, diantaranya:

a. Membuka Sistem Volunteer Pengajar

Strategi yang dilakukan Sekolah Gajahwong dalam memenuhi ketersediaan sumber daya tenaga pendidik ditengah keterbatasan pendanaan yang dimiliki adalah dengan membuka program volunteer bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang berada di Yogyakarta. Sistem ini selain efektif dalam mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki sekolah juga memberikan dampak yang lebih luas lagi, yaitu membangun jaringan dengan berbagai pihak dan dapat menjadi sarana belajar bagi masyarakat luas untuk memahami konsep pendidikan humanis bagi pemenuhan hak pendidikan anak masyarakat marginal.

b. Sistem Jadwal Penyediaan Makan Siang

Uang saku menjadi hal yang identik dengan anak-anak sekolah. Strategi Sekolah Gajahwong untuk memenuhi kebutuhan energi anak dalam proses pembelajaran melalui penyediaan snack dan makan siang yang disediakan oleh para wali murid secara bergantian melalui pembagian jadwal yang telah ditentukan

sebelumnya. Snack dan makan siang yang disediakan tidak hanya diperuntukan bagi siswa tetapi juga bagi fasilitator dan pengajar Sekolah Gajahwong.

c. Donasi Pakaian Bekas Dan Market Day

Strategi lainnya untuk pendanaan di Sekolah Gajahwong adalah dengan menerima donasi pakaian bekas, namun biasanya donasi juga tidak hanya dibatasi pada pakaian bekas saja melainkan barang bekas lainnya seperti tas, sepatu, dan barang layak pakai lainnya. Setelah menerima dan mengumpulkan barang donasi dari berbagai pihak tim volunteer bidang dana dan usaha melakukan penyortiran barang donasi yang telah diterima untuk kemudian dijual belikan kembali melalui dua cara, yaitu 1). Membuka pasar murah bagi masyarakat sekitar di Kampung Ledhok Timoho dan 2). Membuka market day yang berkolaborasi dengan penyelenggaraan event yang menyediakan stand booth untuk berjualan. Strategi ini selain untuk menambah kebutuhan pendanaan sekolah juga untuk melatih anak-anak Sekolah Gajahwong berwirausaha, karena biasanya stand booth market day melibatkan anak-anak untuk berpartisipasi.

d. Membuka Jaringan Kolaborasi

Pada dasarnya Sekolah Gajahwong memiliki donatur tetap yang memberikan dukungan dana untuk keperluan pembelajaran. Namun untuk menambah ketersediaan dana pembelajaran yang lebih baik maka dilakukan berbagai strategi

pendanaan. Membuka jaringan kolaborasi juga merupakan strategi yang sangat baik untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan alat ajar bagi Sekolah Gajahwong. Biasanya banyak komunitas atau lembaga yang mengadakan kegiatan edukasi di Sekolah Gajahwong, selain itu juga memberikan bantuan peralatan belajar dan bahan ajar yang dibutuhkan atau dapat dipergunakan oleh pihak sekolah untuk mendukung proses pembelajaran sehari-hari di Sekolah Gajahwong.

2. Mengembangkan Kurikulum yang Relevan dengan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat

Dimensi kedua yang tidak kalah penting adalah pengembangan kurikulum yang kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial-ekonomi siswa. Analisis dokumen kurikulum menunjukkan bahwa Sekolah Gajahwong tidak hanya mengadopsi kurikulum nasional, tetapi juga mengintegrasikan pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Materi pembelajaran mencakup keterampilan praktis yang dapat langsung diaplikasikan dalam kehidupan keseharian.

Sekolah Gajahwong menerapkan metode pembelajaran yang sangat menarik dan berbeda dari sekolah pada umumnya. Di awal setiap tahun ajaran, siswa dan guru bersama-sama memilih tema pembelajaran yang akan digunakan selama satu semester. Proses pemilihan tema ini dilakukan dengan cara susur desa untuk melihat kondisi lingkungan sekitar, atau dengan berdiskusi bersama untuk menentukan topik yang paling diminati anak-anak. Sebagai contoh, pada salah satu semester mereka memilih

tema "kuda". Selama semester tersebut, ruang kelas dihias dengan berbagai ornamen kuda. Anak-anak kemudian mempelajari segala hal tentang kuda, mulai dari tempat hidupnya, makanan yang disukai, hingga kekuatan yang dimilikinya. Pembelajaran di luar kelas, siswa diajak berkunjung ke kebun binatang dan belajar menunggang kuda secara langsung. Semua aktivitas pembelajaran disesuaikan dengan tema yang telah disepakati bersama.

Penting untuk dipahami bahwa tema pembelajaran berbeda dengan materi pembelajaran. Meskipun tema yang dipilih adalah kuda, materi yang diajarkan di kelas tetap lengkap dan beragam, seperti berhitung, membaca, menulis, dan pelajaran lainnya. Tema hanya berfungsi sebagai "benang merah" yang menghubungkan semua materi pembelajaran agar lebih menarik dan mudah dipahami.

3. Menciptakan Lingkungan Pembelajaran yang Inklusif dan Bebas Diskriminasi

Dimensi ketiga yang menjadi temuan signifikan adalah terciptanya lingkungan pembelajaran yang inklusif dan bebas dari diskriminasi. Observasi partisipan menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan perlakuan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis siswa. Fasilitator menerapkan pendekatan dialogis dalam pembelajaran, dimana setiap siswa diberikan kesempatan yang sama untuk

mengekspresikan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Hasil wawancara dengan orang tua siswa menunjukkan bahwa anak-anak merasa nyaman dan tidak mengalami stigmatisasi. Lingkungan yang inklusif menciptakan ruang aman bagi anak-anak kelompok marginal untuk mengembangkan potensi tanpa rasa takut atau malu.

Sebagai upaya mendorong peran aktif orangtua Sekolah Gajahwong juga mengadakan program *parents meeting* yang diadakan setiap bulannya. Setiap wali murid harus hadir untuk mewakili setiap siswa. Jika orangtua bekerja maka dapat diwakilkan oleh anggota keluarga lainnya seperti nenek atau kakek, paman atau bibi, dan kakak. Agenda *parents meeting* biasanya dilakukan di jam pulang sekolah. Setelah pembelajaran selesai, fasilitator berdiskusi dengan para wali murid menanyakan terkait kendala yang dihadapi setiap anak di luar sekolah dan menyampaikan perkembangan pembelajaran anak. Jika orangtua merasa kesulitan dan mengalami kendala selama pendampingan di luar sekolah maka fasilitator akan memberikan saran. Sehingga penting bagi fasilitator untuk memahami karakter setiap anak secara mendalam. Diskusi dalam agenda *parents meeting* dilakukan dalam suasana yang santai dan menyenangkan.

Temuan-temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah Gajahwong berhasil mengimplementasikan konsep pendidikan humanis yang berperspektif pembebasan. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan sebagai praktik kebebasan, dimana pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer

pengetahuan, tetapi juga sebagai proses humanisasi dan pemberdayaan. Melalui ketiga dimensi yang telah diidentifikasi, sekolah ini berhasil menciptakan ruang alternatif yang memungkinkan anak-anak kelompok marginal untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan identitas sosial dan budaya. Sekolah Gajahwong berkontribusi dalam pemenuhan hak pendidikan kaum tertindas. Keberadaan sekolah ini menunjukkan bahwa hak pendidikan dapat dipenuhi melalui berbagai model dan pendekatan, tidak hanya melalui sistem pendidikan formal yang ada.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Sekolah Gajahwong tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan pendidikan alternatif, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menantang struktur pendidikan mainstream yang seringkali eksklusif. Dalam konteks teori pendidikan kaum tertindas Paulo Freire, Sekolah Gajahwong berhasil mengimplementasikan konsep "pendidikan kaum tertindas" yang memungkinkan siswa dan guru menjadi "co-investigators" dalam mengkaji realitas sosial mereka. Berbeda dengan "banking concept of education" yang dikritik Freire, dimana siswa hanya menjadi wadah pasif penerima informasi, sekolah ini menerapkan pendekatan dialogis yang memungkinkan siswa dari kelompok marginal untuk mengembangkan kesadaran kritis terhadap kondisi sosial-ekonomi yang dihadapi.

Humanitaria: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 2962-2948
E-ISSN : 2962-293X

DOI <https://doi.org/10.14421/hum.v3i2.3657>

Vol. 3 No.02

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/humanitaria>

Model pendidikan yang diterapkan oleh sekolah ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial, karena berhasil memecahkan "culture of silence" yang sering dialami kelompok marginal dalam sistem pendidikan formal. Melalui pendekatan yang memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan pengalaman hidup dan mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran, Sekolah Gajahwong menciptakan apa yang Freire sebut sebagai pendidikan humanis, yaitu pendidikan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga membebaskan dan memberdayakan peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cardoso¹, N. G., Wahini, N. M. P., & Toha, L. I. (2024). Konsep Merdeka Belajar Ditinjau Dari Filsafat Pendidikan Paulo Freire. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(2), 238–247.
<https://doi.org/10.23887/jfi.v7i2.63082>
- Freire, P. (2020). Pedagogy of the oppressed. In *The Community Performance Reader*.
<https://doi.org/10.4324/9781003060635-5>
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>

Humanitaria: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 2962-2948
E-ISSN : 2962-293X

DOI <https://doi.org/10.14421/hum.v3i2.3657>

Vol. 3 No.02

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/humanitaria>

Hamdan, H. (2013). Menggagas Pendidikan Bagi Kelompok Masyarakat Ekonomi Rendah.

Society, 4(1), 18–25. <https://doi.org/10.20414/society.v4i1.328>

Khalis Asyifani, M. A. A., Herlina, & Purnamasar, K. (2014). SOLIDARITAS SOSIAL DALAM MARGINALISASI MASYARAKAT MISKIN (Studi di Dusun Kentheng Kota Surakarta).

Jurnal Kajian Sosiologi, 13(1), 61–75.

Wawancara, (2024).

Wawancara, (2024).

Nas, P. J. M. (2005). *Kota-Kota Di Indonesia*.

Rahman, R. (2019). Peran Agama dalam Masyarakat Marginal. *Sosioireligius: Jurnal Ilmiah*

Sosiologi Agama, 4(1), 80–89. <https://journal.uin->

[alaudidin.ac.id/index.php/Sosioireligius/article/view/10661](https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/Sosioireligius/article/view/10661)

RAMDHON, A. (2021). *Dinamika Aktor dan Kebijakan Kota. Desentralisasi dan Demokratisasi di Kota Surakart 1999-2019*. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/199143>

Sandora, M. (2020). Konsep Pendidikan Anak Marginal Dalam Perspektif Pendidikan

Berbasis Masyarakat. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 18(2), 196.

<https://doi.org/10.24014/marwah.v18i2.7588>

Stephanus Novi Presetia. (2014). *Dokumenter Kampung Ledhok Timoho, Yogyakarta*.

<https://youtu.be/d5ogxoSfoFw?si=AERXqjm82NmJOdK1>

Susanto, A. (2008). *Naival Consciousness*). 81–100.

Humanitaria: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 2962-2948
E-ISSN : 2962-293X

DOI <https://doi.org/10.14421/hum.v3i2.3657>

Vol. 3 No.02

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/humanitaria>

WHO and UNICEF. (2018). *Millions of the world's poorest urban children are more likely to die young and less likely to complete primary school than their rural peers - UNICEF.*

UNICEF. <https://www.unicef.org/turkiye/en/press-releases/millions-worlds-poorest-urban-children-are-more-likely-die-young-and-less-likely>

Zahroh, S. (2019). Pengembangan Sekolah Inklusi dan Pengaruhnya Terhadap Strategi

Asesmen Anak Difabel. *Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2), 83–

99. <https://doi.org/10.24042/ajipaud.v2i2.5739>